

**MAKALAH WORKSHOP NASIONAL**

**NASKAH KEBIJAKAN  
(POLICY PAPER)**

**“MODEL PENGEMBANGAN INISIATIF LOKAL DALAM PENANGANAN  
KEMISKINAN BERBASIS KOMUNITAS MELALUI MATA PENCAHARIAN  
BERKELANJUTAN”**

**Oleh :**

**Dr.Pairan, M.Si  
Project Expert COMCEC – FISIP Universitas Jember**

**DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
DI HOTEL SAHIT CIKARANG  
TANGGAL 29 DESEMBER 2016**

**NASKAH KEBIJAKAN  
(POLICY PAPER)**

**“MODEL PENGEMBANGAN INISIATIF LOKAL DALAM PENANGANAN  
KEMISKINAN BERBASIS KOMUNITAS MELALUI MATA PENCAHARIAN  
BERKELANJUTAN”**

*Dr.Pairan, M.Si  
Project Expert COMCEC*

**ABSTRAKSI**

Kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di wilayah pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagian di antaranya berada di perbatasan dengan negara lain. Kemiskinan di wilayah ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya pengelolaan sumber daya alam, masih rendahnya tingkat pendidikan yang terbatas dan jauh dari akses pengambilan keputusan, terbatasnya akses modal, ilmu pengetahuan dan teknologi, telekomunikasi, pasar dan dukungan politik. Permasalahan lainnya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan antara perkotaan dengan perdesaan dan antara orang kaya dan miskin. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kementerian Sosial selaku instansi pemerintah bertugas meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara. Kementerian Sosial berupaya untuk mengambil aksi terhadap penanganan fakir miskin yaitu dengan cara memberikan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan SKPD Nunukan dan Sumenep terdapat beberapa Rekomendasi yaitu; a) diperlukannya sosialisasi/penyuluhan mengenai Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan orientasi pengelolaan hasil sumber daya alam setempat dan mata pencaharian lokal dan menyiapkan sistem pemasaran produk lokal yang dihasilkan; b) diperlukannya pelatihan lebih lanjut kepada sasaran program (masyarakat) tentang hasil laut, pertanian dan perkebunan (pengolahan hasil dan kemasan produk); dan c) diperlukan pelatihan lebih lanjut kepada tenaga pendamping tentang pengetahuan dan ketrampilan pengolahan hasil dan pemasaran produk, dan pendamping kemensos perlu koordinasi dengan pendamping instransi yang lain yang sudah ada dimasyarakat. Pengembangan Inisiatif Lokal Dalam Penanganan Kemiskinan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Kecil Melalui Mata Pencaharian Berbasis Komunitas yang berhasil dikembangkan berlandaskan tiga komponen praktis, yakni; a) Pemetaan Sosial Ekonomi; b) Pemberdayaan melalui UEP; dan c) Mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial melalui E-Warong. Model tersebut bisa digunakan sebagai formulasi kebijakan Penanganan kemiskinan berbasis masyarakat lokal pada masyarakat miskin daerah perbatasan dan daerah kepulauan melalui matapencaharian berkelanjutan.

## **Pendahuluan**

Kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di wilayah pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagian di antaranya berada di perbatasan dengan negara lain. Kemiskinan di wilayah ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya pengelolaan sumber daya alam, masih rendahnya tingkat pendidikan yang terbatas dan jauh dari akses pengambilan keputusan, terbatasnya akses modal, ilmu pengetahuan dan teknologi, telekomunikasi, pasar dan dukungan politik. Permasalahan lainnya yang dialami oleh masyarakat di pulau-pulau kecil terluar dan daerah perbatasan adalah terciptanya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan dan antara orang kaya dan miskin

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kementerian Sosial selaku instansi pemerintah bertugas meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara. Upaya yang dilakukan Kementerian Sosial dalam penanganan fakir miskin yaitu dengan cara memberikan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan bantuan Sarana Lingkungan (Sarling) serta pendampingan sosial.

Mengingat kompleksitas permasalahan kemiskinan yang terjadi di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar Negara, Kementerian Sosial melalui Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, membentuk direktorat baru yaitu Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara.

Pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat lokal untuk masyarakat miskin di perbatasan dan daerah kepulauan menjadi sebuah gagasan atau jawaban dari permasalahan yang selama ini dihadapi oleh wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara. Pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat lokal ialah upaya sebuah cara untuk menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan isu-isu lokal, serta pelaksanaannya pun menggunakan pendekatan lokal secara holistik. Upaya tersebut menciptakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Keberfungsian sosial merupakan konsep dari kebutuhan dasar yang telah menjadi wajib dan keharusan untuk dipeuhi. Karena pada dasarnya, selama manusia berada dalam ruang dan waktu, maka manusia adalah makhluk yang selalu ingin memenuhi kebutuhannya dengan tangannya sendiri. Potensi inilah yang dapat dikembangkan menjadi sebuah inisiatif lokal yang bermutu tinggi tentunya harus ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Tujuan Inisiatif lokal adalah berusaha meningkatkan kemampuan keluarga miskin berdasarkan sumber daya lokal, modal, sarana dan prasarana, struktur sosial dan organisasi lokal, agar dapat mencapai hasil yang optimal. Inisiatif lokal diharapkan dapat memperbaiki keadaan sebelumnya ke arah yang lebih baik, serta memberikan, dorongan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan, menumbuh kembangkan semangat dalam memperbaiki keadaan-keadaan sebelumnya.

Menciptakan masyarakat berdaya dengan inisiatif lokal melauli upaya pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat lokal pada masyarakat miskin di perbatasan dan daerah kepulauan adalah salah satu langkah kongkrit untuk mendorong negara secara konsisten menciptakan kesejahteraan. Dengan demikian negara harus betul-betul mengarahkan program-program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat lokal untuk menghasilkan kondisi yang sejahtera dan mampu bersaing di era globalisasi ini.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI berusaha untuk menangani masyarakat miskin di perbatasan dan daerah kepulauan agar lebih berdaya, sehingga masyarakat daerah perbatasan dan daerah kepulauan dapat menjadi masyarakat mandiri serta berkembang dan mampu bersaing di era globalisasi ini. Untuk itu diperlukan formulasi model pengembangan inisiatif lokal dalam penanganan kemiskinan berbasis masyarakat lokal melalui mata pencaharian di wilayah perbatasan dan daerah kepulauan.

### **Deskripsi Masalah.**

Penanganan fakir miskin pesisir pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis yang mempunyai keterbatasan infrastruktur dan juga tertinggal dari berbagai pembangunan. Kemiskinan juga menjadi permasalahan serius di wilayah ini akibat dari kurangnya pengelolaan sumber daya alam, masih rendahnya tingkat pendidikan dan jauh dari akses pengambilan keputusan, terbatasnya akses modal, ilmu pengetahuan dan teknologi, telekomunikasi, pasar dan dukungan politik. Permasalahan lainnya yang dialami oleh masyarakat di pulau-pulau kecil terluar dan daerah

perbatasan adalah terciptanya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan dan antara orang kaya dan miskin.

Keterbatasan infrastruktur dan juga ketertinggalan dari berbagai pembangunan terlihat di Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Luas wilayah kecamatan Raas 38,9 km<sup>2</sup> meliputi 9 desa. Penduduk Kecamatan Raas berjumlah 34.784 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 894,19 jiwa/km<sup>2</sup>. Panjang jalan darat Kecamatan Raas secara keseluruhan sepanjang 50,443 km<sup>2</sup>, dengan kondisi jalan rusak 14,41% dan rusak berat 19,82%. Sarana angkutan darat bermotor terdiri dari truk, *pick up*, Viar (Sepeda Motor Roda 3) sepeda motor, Becak Motor dan tidak bermotor terdiri dari becak dan sepeda dan Grobak. Sarana dan prasarana di Kecamatan Ra'as cukup memperhatikan, diketahui bahwa Penerangan listrik belum menggunakan PLN, yakni masih menggunakan PLTD yang dikelola Swasta, yang hanya hidup 12 Jam saja.

Akses Penyeberangan antar pulau menggunakan Perahu nelayan, dengan rute penyeberangan dari Sumenep menuju Raas dan dari Raas menuju Sumenep. Perjalanan dari Dermaga Dongke Sumenep menuju Pulau Raas membutuhkan waktu sekitar 4 sampai dengan 5 jam. Penyeberangan Raas sering kali terkendala perahu yang tidak setiap hari ada. Kapal penyeberangan menuju kepulauan Raas kerap kali mewaspadaai ketinggian gelombang laut yang terkadang tingginya mencapai 2 meter akibat pengaruh musim yang memicu hembusan angin dari arah tenggara yang begitu kencang. Kondisi tersebut kerap mengganggu atau menghambat jalur transportasi sehingga nelayan dan kapal tidak memungkinkan lagi untuk memuat penumpang dan barang.

Demikian juga untuk masyarakat wilayah perbatasan antara negara, khususnya Pulau Sebatik. Masyarakat di Pulau Sebatik kesulitan saat akan menjual hasil buminya. Warga perbatasan tidak menjual ke kota terdekat karena memerlukan perjalanan yang memakan waktu dan menempuh medan berat. Karena risiko lebih besar, warga akhirnya banyak menjual hasil bumi ke Kota Tawau Malaysia.

Disamping terdapat berbagai masalah dan kendala di wilayah pulau-pulau kecil dan perbatasan antara negara tersebut juga terdapat potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan hasil pemetaan sosial dan ekonomi yang dilakukan dalam kegiatan proyek COMCEC di kepulauan Sebatik dan kepulauan Raas, diperoleh data sebagai berikut a) kekuatan Aktor Sosial yang Dominan di dalam Kerangka Perubahan Sosial di Raas adalah Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat; b) Kekuatan Aktor Sosial yang Dominan di dalam Kerangka Perubahan Sosial di Sebatik adalah Kepala Desa, Ketua RT, Tokoh Masyarakat; c) Lembaga Formal

yang Dominan didalam Kerangka Perubahan Sosial di Raas ialah GAPOKTAN, POKMAS, PKK; d) Lembaga Formal yang Dominan didalam Kerangka Perubahan Sosial di Sebatik yaitu Kelompok tani, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu.

Sedangkan potensi ekonomi diperoleh data sebagai berikut : a) Sumber Daya Potensial di Raas yang dimiliki berupa Lahan Peternakan, Kandang Ayam, Kandang Kambing, Lahan Pertanian; b) Sumber Daya Potensial di Sebatik sejenis Kebun pisang, Kebun Kelapa Sawit, Kebun Merica, Kebun Coklat, Kebun Kelapa, Hasil Laut (udang dan ikan kering); c) Mata Pencaharian di Raas yang dominan yaitu Petani, Ternak, Nelayan; d) Mata Pencaharian di Sebatik yang dominan ialah Petani Sawit, pisang, coklat, merica, Nelayan, Jasa, Buruh kebun/ tani.

### **Model Pengembangan Inisiatif Lokal Dalam Penanganan Kemiskinan Di Wilayah Perbatasan Antar Negara Dan Pulau-Pulau Kecil.**

Fakir miskin daerah kepulauan dan daerah perbatasan identic dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau serta didukung dengan keterbatasan infrastruktur dan ketertinggalan dalam sektor pembangunan, untuk penanganannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin dijelaskan bahwa upaya penanganan fakir miskin diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui; a) penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut; b) bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha; dan c) penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan. Sedangkan upaya penanganan fakir miskin diwilayah perbatasan antarnegara dilakukan melalui; a) penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan; b) bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan; c) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana; dan d) penguatan kelembagaan dan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Program Penanganan Fakir Miskin yang dikembangkan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara, yaitu; a) Pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP); b) Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni; dan c) Bantuan Sosial Sarana lingkungan.

Dalam tahapan kegiatan proyek COMCEC, dalam kegiatan FGD yang dilakukan dengan SKPD Nunukan dan Sumenep terdapat beberapa Rekomendasi yaitu; a) diperlukannya sosialisasi/penyuluhan mengenai Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan orientasi pengelolaan hasil sumber daya alam setempat dan mata pencaharian lokal dan menyiapkan sistem pemasaran produk lokal yang dihasilkan; b) diperlukannya pelatihan

lebih lanjut kepada sasaran program (masyarakat) tentang hasil laut, pertanian dan perkebunan (pengolahan hasil dan kemasan produk); dan c) diperlukan pelatihan lebih lanjut kepada tenaga pendamping tentang pengetahuan dan ketrampilan pengolahan hasil dan pemasaran produk, dan pendamping kemensos perlu koordinasi dengan pendamping instransi yang lain yang sudah ada dimasyarakat.

Rekomendasi tersebut sebagai upaya untuk menciptakan peluang pemasaran produk Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Peluang pemasaran diperlukan karena selama ini kondisi di Sebatik bahwa hampir sebagian besar makanan olahan dan sembako di pasok dari Malaysia (Kota Tawau). Didamping itu juga belum ada pusat toko penjualan hasil produksi makanan olahan baik olahan hasil pertanian, perkebunan dan laut, serta belum ada pengelolaan berbasis kelompok di daerah tersebut. Demikian juga di Pulau Raas bahwa peluang penjualan telur ayam kampung dan kerajinan hasil laut berpeluang besar untuk di pasarkan ke Pulau Bali keperluan sebagai kelengkapan sesaji dan souvenir. Namun demikian belum ada lembaga lokal yang memfasilitasi penjualan produk tersebut.

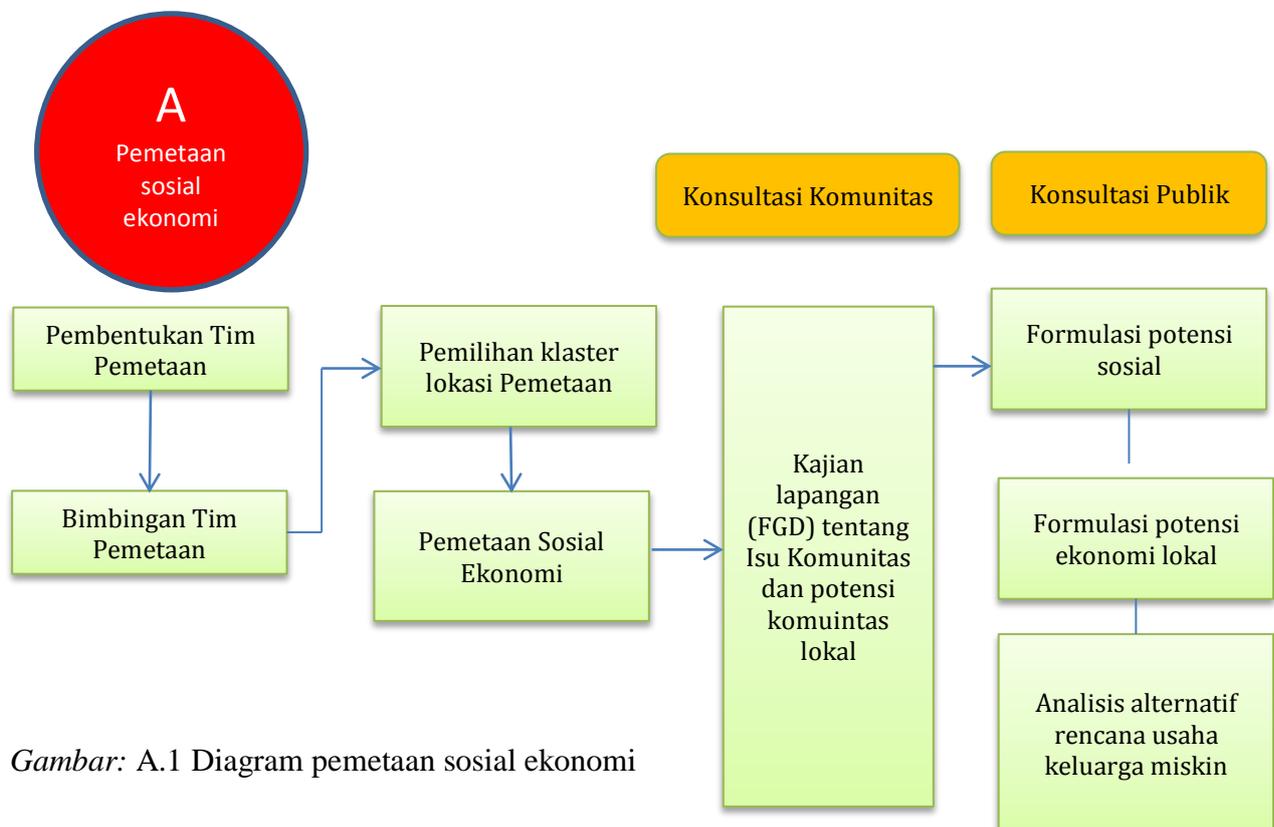
Disamping pelaksanaan pemetaan sosial ekonomi dan penguatan kapasitas masyarakat miskin di Pulau Sebatik dan Pulau Raas, kegiatan COMCEC juga melakukan workshop internasional yang bertujuan untuk 1) Menyajikan model inovatif Inisiatif lokal untuk pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan di Indonesia, Turki, Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. 2) Mempelajari praktik terbaik dari intervensi setara proyek / program yang disajikan oleh universitas, lembaga penelitian, donor / LSM, pusat / pemerintah daerah internasional di Indonesia. Dari kegiatan workshop internasional ini diperoleh ide-ide berharga yang bisa digunakan untuk menyusun konsep model pengembangan inisiatif lokal dalam pengentasan kemiskinan melalui mata pencaharian berkelanjutan.

Ide-ide tersebut diantaranya adalah Indikator kemiskinan yang terdiri dari 1) inisiatif lokal / tingkat yang dipilih oleh anggota masyarakat. 2) tingkat pendapatan. 3) kondisi makanan. 4) kesehatan dan 5) tingkat pendidikan. Dengan indikator kemiskinan yang demikian maka strategi pengentasan kemiskinan bisa dilakukan dengan 1) membangun kapasitas, karena kemiskinan muncul ketika orang tidak memiliki kemampuan pengangguran. 2) program pendekatan berfokus pada peningkatan / keuntungan mata pencaharian kehidupan. 3) memilih sebuah kegiatan sosial dan ekonomis yang sesuai dengan potensi ekonomi setempat. 4) mengembangkan atau menemukan varian makanan baru. Berdasarkan konsep strategi pengentasan kemiskinan tersebut maka program pengentasan kemiskinan yang direkomendasikan adalah 1) transfer tunai atau e-voucher untuk mendukung kebutuhan

dasar. 2) transfer tunai bersyarat untuk membangun usaha mikro. 3) Pelatihan atau pengembangan kapasitas. 4) pembinaan dan fasilitasi pembangunan jaringan (seperti pemasaran produk, informasi).

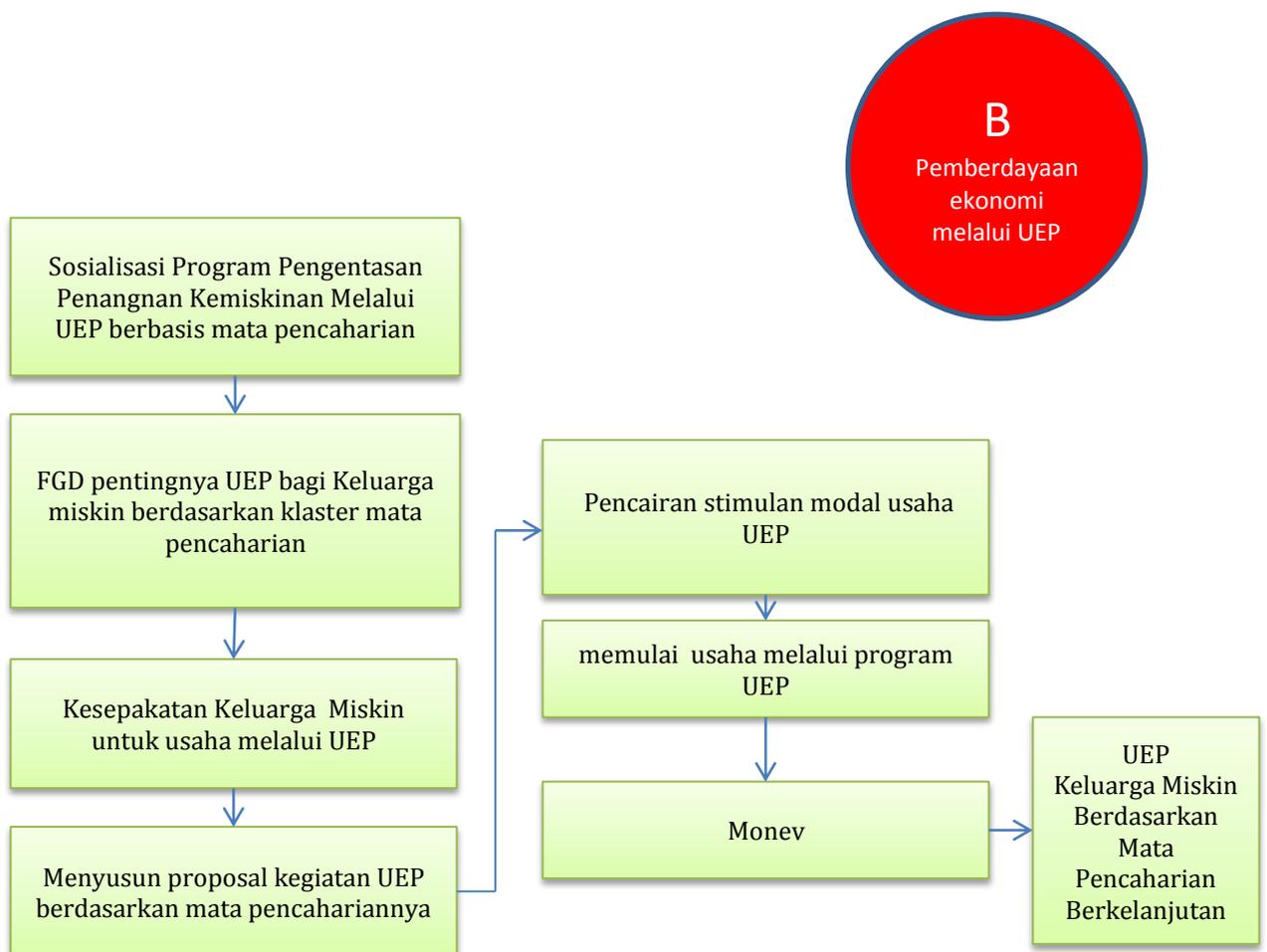
Dengan didasarkan pada paparan hasil kegiatan tersebut di atas dapat disusun model pengembangan inisiatif lokal dalam pengemtasan kemiskinan berdasarkan mata pencaharian. Model pengembangan inisiatif lokal didasarkan pada tiga komponen praktis, yakni; a) Pemetaan Sosial Ekonomi; b) Pemberdayaan melalui UEP; dan c) Mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial.

Pemetaan Sosial Ekonomi telah dipaparkan diatas, namun secara praktis langkah yang dilakukan ialah pengkondisian Tim atau pembentukan Tim Pemetaan, tim tersebut beranggotakan tenaga-tenaga ahli (expert) pada bidangnya. Kemudian Tim pemetaan akan mendapat bimbingan teknis terkait dengan proyek yang akan dijalankan. Pemilihan kluster lokasi pemetaan dilakukan oleh Tim setelah mendapatkan Bimtek. Setelah itu, pemetaan sosial ekonomi dilakukan. Pemetaan sosial ekonomi menggunakan pendekatan non-directive (tidak langsung) yakni dengan FGD, bertujuan untuk mengangkat isu komunitas dan potensi komunitas lokal. Dengan kajian lapangan dapat memformulasikan (potensi sosial, ekonomi lokal dan analisis alternative rencana usaha). Pemetaan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dapat secara praktis dipahami melalui diagram berikut.



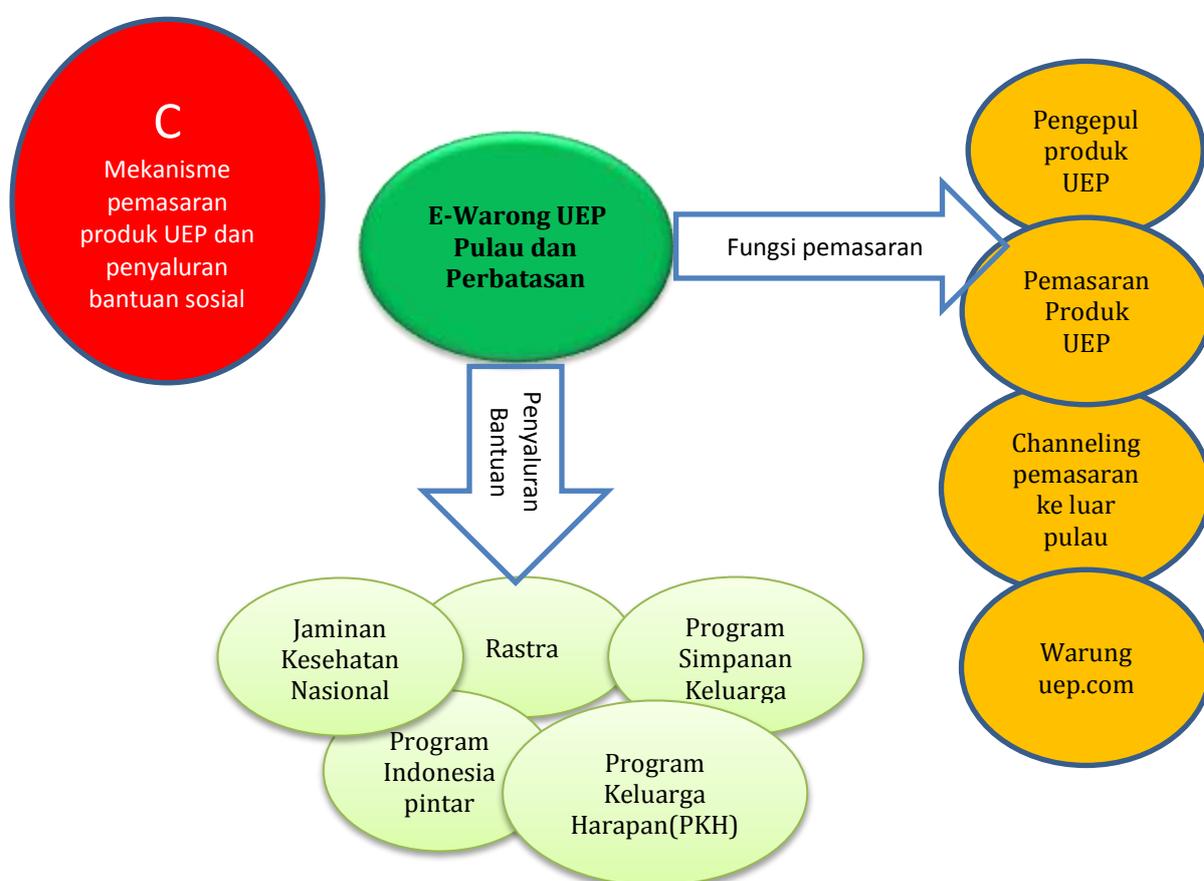
Gambar: A.1 Diagram pemetaan sosial ekonomi

Berdasarkan hasil pemetaan sosial ekonomi yang telah dilakukan oleh Tim pemetaan, maka komponen berikutnya yang akan dilakukan ialah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pada tahap ini pihak pelaksana program melakukan sosialisasi Program Pengentasan Penanganan Kemiskinan Melalui UEP berbasis mata pencaharian. Pengkondisian FGD, langkah ini bertujuan mengelompokkan Keluarga miskin berdasarkan klaster mata pencaharian. Kemudian pihak pelaksana program melakukan kesepakatan dengan Keluarga Miskin perihal usaha melalui UEP. Setelah kesepakatan diantara kedua belah pihak terjalin maka proses penyusunan proposal kegiatan UEP berdasarkan mata pencaharian disusun. Proposal sebagai langkah awal untuk pencairan stimulan modal usaha UEP. Ketika modal stimulus dicairkan, pihak keluarga dapat memulai usaha melalui program UEP dengan uang atau modal kongkrit yang disediakan oleh pihak pelaksana program. Dengan begitu UEP Keluarga Miskin Berdasarkan Mata Pencaharian Berkelanjutan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan program. Pemberdayaan Ekonomi melalui UEP sebagaimana dimaksud dapat secara praktis dapat digambarkan melalui diagram berikut.



Gambar: B.1 Diagram pemberdayaan ekonomi melalui UEP

Komponen berikutnya ialah kejelasan tentang Mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial. Pengadaan E-Warong UEP menjadi wadah produk dengan tujuan untuk memasarkan hasil produksi rumah tangga meliputi pengepulan produk, pemasaran produk, channeling pemasaran ke luar pulau dan warong UEP.com. Fungsi lainnya dari E-warong UEP ialah sebagai penyaluran bantuan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional. Rastra. Program Simpanan Keluarga, Program Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan. Mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud secara praktis digambarkan melalui diagram berikut:



Gambar: C.1 Diagram pemberdayaan ekonomi melalui UEP

Fungsi e-Warong dalam Penyaluran bantuan sosial seperti yang dimaksudkan dalam penjelasan Mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial ialah sebagai media kontroling harga sembako pada masyarakat. Dengan e-warung penjualan atau pembelian sembako diharapkan dapat berjalan kondusif dengan terjangkaunya harga beli barang (sembako) atau istilah lainnya ialah Elemen stabilisasi harga sembako dan menjadi

target distribusi operasi pasar. Selain itu, e-Warung berfungsi sebagai media Penyalur bansos non tunai (*Agent Bank*), kemudian e-warung juga berfungsi sebagai Outlet koperasi. Hal tersebut menekankan bahwa peran e-warung sangat strategis sebagai bentuk produk dari inisiatif lokal. Keberadaan e-warung memperkuat intensitas dan keberlanjutan program usaha ekonomi produktif. Manfaat e-warung UEP sebagaimana yang dimaksud dapat secara praktis dipahami melalui diagram berikut :



Gambar: Diagram pemberdayaan ekonomi melalui UEP

Secara eksplisit Fungsi e-Warung akan menghasilkan impact (*dampak*) yakni dengan melalui kerjasama e-Warung dan Distributor sembako dapat dipastikan ketersediaan uang/barang di agen/outlet. Kemudian E-Warung selain sebagai tempat transaksi perdagangan sembako dan produk KUBE, juga bertindak sebagai agen bank untuk aktivasi dan pencairan bantuan sosial.

Konsep E-warung UEP pada lokasi Pulau dan Perbatasan yang akan beroperasi di wilayah Sembatik dan Raas dan akan dimiliki oleh 50 Keluarga miskin penerima UEP yang menjadi pembinaan COMCEC dengan susunan pengurus sebagai berikut:

1. Pelindung : Kepala Desa
2. Pengarah : Koordinator Pendamping Kecamatan
3. Pembina : Pendamping Desa

Pengurus Harian :

1. Ketua : Penerima UEP
2. Sekretaris : Penerima UEP
3. Bendahara : Penerima UEP
4. Anggota : 7 Orang penerima UEP

Catatan :

UEP dilaksanakan secara perorangan, sehingga kelompok diorientasikan untuk pemasaran hasil produksi UEP yang dimiliki secara bersama-sama 50 keluarga penerima UEP dan dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari diorganisir oleh pengurus harian yang dilindungi oleh kepala desa dan diarahkan, dibina oleh pendamping desa.

### **Kesimpulan Dan Rekomendasi.**

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Formulasi mengenai Pengentasan kemiskinan daerah perbatasan dan daerah kepulauan dapat menerapkan model pengembangan inisiatif lokal dalam pengentasan kemiskinan berbasis komunitas melalui mata pencaharian berkelanjutan, melalui tiga tahap kegiatan pemetaan sosial ekonomi, pemberdayaan ekonomi melalui UEP, dan Mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial melalui E-warung UEP.
2. UEP disinergiskan dengan sumber daya alam setempat dan mata pencaharian penerima program untuk memberikan nilai tambah.
3. Penerima UEP diorientasikan sampai bisa memasarkan hasil produksinya.
4. E Warung Perbatasan dan Pulau diorientasikan untuk pemasaran hasil produksi UEP dan membangun Chanelling pemasaran ke luar pulau dan warung.com.
5. Perlu pelatihan lebih lanjut kepada sasaran program (masyarakat) tentang hasil laut, pertanian dan perkebunan (pengolahan hasil dan kemasan produk,)

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahrudin, A. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Kurniawan, L. J., Sukmana, O., Abdussalam, dan Masduki. 2015. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing
- Mardikanto.2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Solekhan, M. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara press
- Republik Indonesia. *Undang-Uandang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. Pemerintahan: Republik Indonesia
- Republik Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 40/PFM/SK/HK.01/09/2016*. Pemerintahan: Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja*. Pemerintahan: Republik Indonesia